

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) sampai dengan ayat (2) Kesehatan.Pasien dalam keadaan darurat harus diberikan pelayanan segera untuk mengatasi keadaan klinis pasien, sehingga setiap pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dilarang untuk menolak pasien dalam keadaan gawat darurat. Namun salah satu contoh fenomena yang penulis temui terdapat kasus di RS Manuaba dimana Calon Pasien yang tidak mendapatkan pelayanan IGD Saat itu karena Rumah Sakit bersangkutan terjadi pelonjakan jumlah pasien pada IGD. Rumusan Masalah skripsi ini adalah (1) Bagaimana Hak – hak pasien dalam keadaan Gawat Darurat ?; (2) Bagaimana Perlindungan Pasien yang tidak mendapat pelayanan Kesehatan dalam keadaan Gawat Darurat ? dan (3) Bagaimana Sanksi Hukum Dokter yang tidak melaksanakan pelayanan Kesehatan terhadap pasien dalam keadaan Gawat Darurat ?. Metode Penelitian ini menggunakan yuridis normatif untuk menjawab rumusan masalah yang penulis angkat dari perspektif peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Hasil Penelitian adalah (1) Pasien yang mengalami gawat darurat memiliki hak-hak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia seperti Hak- hak atas pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan profesional; hak atas informasi tentang kondisi kesehatan; hak untuk menolak tindakan medis kecuali dalam keadaan yang mengancam jiwanya. Hak-hak ini harus dihormati dan dilindungi oleh petugas kesehatan. (2) Pasien di Indonesia juga memiliki perlindungan hukum dan dapat menuntut dokter atau rumah sakit secara pidana jika tidak mendapatkan pelayanan gawat darurat yang sesuai. (3) Dokter yang tidak melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam keadaan gawat darurat dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata.

Kata Kunci : Gawat Darurat; Hak Pasien; Hukum Kesehatan

ABSTRACT

Based on Article 32 paragraph (1) to paragraph (2) Health. Patients in emergencies must be provided with immediate services to overcome the patient's clinical condition, so that every health service both government and private is prohibited from rejecting patients in an emergency. However, in one example of the phenomenon that the author encountered, there was a case at Manuaba Hospital where prospective patients who did not get emergency room services at that time because the hospital concerned there was an increase in the number of patients in the emergency room. The formulation of this thesis problem is (1) What are the rights of patients in the Emergency Department?; (2) How is the protection of patients who do not receive health services in an emergency? and (3) What are the Legal Sanctions for Doctors who do not carry out health services for patients in the Emergency Department? This research method uses normative juridical to answer the formulation of the problem that the author raises from the perspective of applicable laws and regulations in Indonesia. The results of the study are (1) Patients who experience emergencies have rights regulated in various laws and regulations in Indonesia such as the rights to fast, precise, and professional health services; the right to information about health conditions; the right to refuse medical treatment except in life-threatening circumstances. These rights must be respected and protected by health workers. (2) Patients in Indonesia also have legal protection and can prosecute doctors or hospitals criminally if they do not receive appropriate emergency services. (3) Doctors who do not provide health services to patients in an emergency may be subject to criminal and civil sanctions.

Keywords : Emergency; Health Law ;Patient Rights;